

PERANAN *GOOD GOVERNANCE* DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR

Oleh :

Nurhayati, SE, M.Si

Dosen Universitas Darmawangsa, Medan

Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan *good governance* dan independensi auditor terhadap kinerja auditor. Metode penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (*library reserach*). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja auditor, sebaiknya auditor perlu mengembangkan *good governance*, karena dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja auditor yang dapat dilakukan dengan meningkatkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban.

Kata kunci : *good governance*, *independensi auditor* dan *kinerja auditor*.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Akuntan dalam konteks profesi bidang bisnis, bersama-sama dengan profesinya lainnya, mempunyai peran yang signifikan dalam operasi suatu perusahaan. Akuntan saat ini telah menjadi salah satu profesi di dalam bidang bisnis. Akuntan publik memiliki dua tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya.

Profesi sebagai akuntan publik memainkan peranan sosial yang sangat penting berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh auditor. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tugas seorang akuntan publik adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu e ntitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan IAI. Hal ini menunjukkan bahwa auditor bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan.

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Keberadaan akuntan publik sebagai suatu profesi tidak dapat dipisahkan dari karakteristik independensinya. Akuntan publik selalu dianggap orang yang harus independen. Akuntan publik tidak berarti apa-apa, tanpa adanya independensi. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan akuntan publik sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari akuntan publik. Masyarakat akan meminta pihak lain

yang dianggap independen untuk menggantikan fungsi akuntan publik, dengan kata lain keberadaan akuntan publik ditentukan oleh independensinya.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.

Auditor harus benar-benar independen, auditor juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa auditor benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah pemerolehannya. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan.

Mulai dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh SEC (*Securities Exchange Commission*) dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, selain itu, timbulnya kasus-kasus serupa menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *corporate governance* yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan.

Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Sunarsip menyatakan bahwa peran profesi akuntan selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu, tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis manufaktur maupun non-manufaktur termasuk KAP sendiri. Peran profesi auditor dalam hal ini harus lebih diberdayakan baik secara internal (KAP) maupun eksternal (*stakeholder*) agar mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan *good governance* tersebut. Pemberdayaan auditor antara lain: pemahaman *good governance* yang lebih baik, tanggung jawab yang lebih besar dan kebebasan mengkreasi pekerjaan dalam membantu *stakeholder* namun tidak menyalahi etika profesi yang ada.

Pengetahuan akan hukum bisnis agar mampu mengidentifikasi perilaku bisnis yang lebih kompleks. Keahlian dalam menganalisis kondisi mendatang yang lebih baik sehingga opini yang dihasilkan akan sangat aktual dan terpercaya. Menurut Larkin (1990) dalam Trisaningsih (2007) dalam mengukur kinerja auditor, terdapat empat dimensi personalitas, yaitu kemampuan (*ability*), komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor, secara ideal di dalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya memperhatikan prinsip dasar *good governance* dalam KAP tersebut. Auditor juga harus menaati aturan etika profesi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan *good governance* dan independensi auditor terhadap kinerja auditor.

1.3. Metode Penelitian

Metode penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (*library reserach*). Pembahasan pada tulisan ini didasarkan pada pendapat-pendapat ahli atau hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja seseorang yang menggambarkan kualitas dan kuantitas atas kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja antara satu orang dengan yang lainnya dapat saja berbeda, karena faktor-faktor pendorong yang berbeda. Kinerja seseorang dalam sebuah organisasi akan menentukan efektif tidaknya kinerja organisasi tersebut.

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mangkunegara dalam Rokhim (2010), kinerja menunjukkan hasil kerja yang dicapai seseorang setelah melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan oleh organisasi. Kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok.

2.2. Pengertian Kinerja Auditor

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Mulyadi, 2002: 11).

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Penilaian kinerja karyawan memiliki tujuan yang tidak hanya bermanfaat bagi institusi tempat karyawan bekerja tetapi juga bagi karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja karyawan merupakan sistem pengendali sebagai umpan balik (*feedback*) dan sebagai

umpan maju (*feedforward*). Tingkat dan kualitas kinerja auditor ditentukan oleh beberapa faktor baik perseorangan maupun lingkungan.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja dan perilaku yaitu faktor individu yang berasal dari dalam diri seseorang, faktor organisasi, dan faktor fisiologis. Faktor individu dapat berupa motivasi, kemampuan pengetahuan dan ketrampilan, pengalaman, sikap. Faktor organisasi dapat berupa struktur organisasi, pemimpin, rekan sejawat, beban pekerjaan, rancangan kerja, kondisi kerja. Faktor-faktor ini tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja seorang auditor tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja.

Menurut Davis dalam Rokhim (2010) faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). Secara psikologis kemampuan seseorang terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan relity (*knowledge* dan *skill*). Kemampuan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu dapat memudahkan seseorang untuk mencapai kinerja sesuai yang diharapkan.

Menurut Mangkunegara (2002: 67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*), kemampuan realitas (*knowledge and skill*).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kinerja dapat diukur melalui pengukuran tertentu, dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan.

2.4. Pengertian Good Governance

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Pemahaman *good governance* dapat didefinisikan dengan seberapa jauh pemahaman atas konsep tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik oleh para auditor. Pemahaman *good governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.

Pemahaman atas *good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintahan (*good government governance*).

2.5. Prinsip Good Governance

Adapun prinsip dasar konsep *good governance* pada organisasi KAP meliputi:

- 1) *Fairness* (keadilan): akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.
- 2) *Transparency* (transparansi): hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang diaudit.

- 3) *Accountability* (akuntabilitas): menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, juga pelaporan.
- 4) *Responsibility* (pertanggungjawaban): memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar profesional akuntan publik selama menjalankan profesinya.

Good governance tidak hanya terbatas pada bagaimana pelayanan diberikan, dijalankan dan dikelola, tetapi juga pada bagaimana keputusan tentang pelayanan-pelayanan itu diambil. Memperkenalkan *good governance* dari satu sisi bertujuan meningkatkan kinerja pemberian pelayanan, di sisi lain juga meningkatkan representasi berbagai *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan tentang pelayanan-pelayanan itu sendiri. Profesi akuntan harus mulai dengan meningkatkan peran sosial kemasyarakatan dengan meningkatkan kualitas kerja dan tanggung jawab profesional serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, untuk dapat berperan dalam mendukung terciptanya *good governance*. Akuntan diharapkan tidak hanya berguna bagi entitas bisnis semata untuk mewujudkan *good corporat governance*, namun juga membantu dalam masalah korupsi, kolusi, nepotisme, penyelewengan dan penipuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan *good governance* dalam KAP sangat berarti dalam membangun budaya, nilai-nilai serta etika bisnis yang melandasi pengembangan perilaku profesional akuntan. Diterapkannya *good governance* pada KAP, diharapkan dapat memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja auditor.

2.6. Independensi Auditor

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002: 26).

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar umum kedua (SA Seksi 220 dalam SPAP, 2005) menyebutkan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor". Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Ia tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independensi yang dimaksud di atas tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditor. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat (*reasonable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur.

Sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan untuk diakui pihak lain. Sebagai contoh, seorang auditor yang mengaudit suatu perusahaan dan ia juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun ia telah menggunakan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai seorang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi. Demikian juga halnya, seorang auditor yang mempunyai kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut, namun bagaimana pun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya. Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi auditor ditekankan di sini karena independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang persepsi independensi ini dimasukkan ke dalam Aturan Etika, hal ini akan mengikat auditor independen menurut ketentuan profesi. Auditor dalam kenyataannya seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut,
- b. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya,
- c. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

3. Pembahasan

Good governance sebagai acuan dari seorang auditor secara positif dapat mempengaruhi kinerja auditor. Semakin tinggi pemahaman *good governance* yang diterapkan sesuai dengan aturan kode etik maka seorang auditor mampu meningkatkan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan penyajian laporan keuangan melalui pengawasan yang akuntabel dan berkeadilan, sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam institusi.

Penerapan *good governance* dalam suatu daerah berarti membangun kultur, nilai-nilai serta etika yang melandasi pengembangan perilaku profesional. Dimana dalam melaksanakan pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Badjuri dan Trihapsari (2004) mengemukakan bahwa suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter sangat penting untuk profesi akuntan publik di dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi (auditing)

terhadap kliennya. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan.

Kode etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, obyektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan obyektivitas akan bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan dan permintaan pihak tertentu, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Disamping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Awaluddin (2013 : 12) menyatakan bahwa independensi dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Jika inpektorat ingin meningkatkan kinerja auditor, maka sedapat mungkin melakukan peningkatan kualitas independensinya dengan melakukan training maupun permainan pelatihan pada auditor.

Independensi merupakan aspek penting bagi profesionalisme akuntan khususnya dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pelayanan jasa akuntan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan klien maupun publik secara luas dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda. Seorang auditor yang memiliki independensi tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik.

4. Penutup

Untuk meningkatkan kinerja auditor, sebaiknya auditor perlu mengembangkan *good governance*, karena dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja auditor yang dapat dilakukan dengan meningkatkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban.

Daftar Pustaka

- Indah, Siti Nur Mawar. 2010. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP di Semarang)*. Skripsi S1 Akuntansi Undip, Semarang.
- Ispriyanti, Dwi dan Budi Warsito. 2004. *Uji Linearitas Data Time Series Dengan Reset Test*. Jurnal Matematika dan Ekonomi, Vol 7. No.3, 36-44.
- Kuncoro, Mudrajat. 2007. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP YKPN Mangkunegara.
- Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, 2002. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Rokhim, Nur. 2010. *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Kader IMP Dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening*. Tesis Program Pasca Sarjana STIE AUB, Surakarta.

Trisnaningsih, Sri, 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor*. Simposium Akuntansi Nasional X Makasar 26 - 28 Juli 2007.

